

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. PERKEMBANGAN INFLASI TRIWULAN II TAHUN 2026

Selama Triwulan II Tahun 2026 (April-Juni), perkembangan inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif namun masih terkendali. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan April 2026 Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami inflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 0,38% dengan inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) sebesar 3,82%. Selanjutnya pada bulan Mei 2026 terjadi deflasi sebesar 0,17% (m-to-m), sedangkan inflasi tahunan meningkat menjadi 4,90% (y-on-y). Pada bulan Juni 2026 kembali terjadi inflasi sebesar 0,03% (m-to-m) dengan inflasi tahunan sebesar 4,54% (y-on-y).

Secara umum, pola inflasi pada Triwulan II dipengaruhi oleh dinamika harga komoditas pangan bergejolak (*volatile food*) serta penyesuaian harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Deflasi yang terjadi pada bulan Mei menunjukkan adanya perbaikan pasokan beberapa komoditas, sedangkan inflasi pada bulan Juni dipengaruhi terutama oleh kenaikan kelompok Transportasi, khususnya akibat kenaikan harga bensin, disertai kenaikan harga bawang merah, cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, bawang putih, tomat dan bahan bakar rumah tangga.

Secara tahunan, inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Juni 2026 sebesar 4,54%, dengan penyumbang terbesar berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi 7,91% dan memberikan andil 3,22 poin persen terhadap inflasi umum. Selain itu, kelompok Transportasi juga memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan sebesar 0,27 poin persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Berdasarkan perkembangan inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih didominasi oleh tingginya volatilitas harga komoditas pangan strategis. Komoditas seperti beras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, telur ayam ras serta beberapa komoditas perikanan masih menjadi penyumbang utama inflasi baik secara bulanan maupun tahunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga komoditas pangan masih sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta kelancaran distribusi.

Selain faktor pangan, kelompok Transportasi juga memberikan tekanan inflasi pada bulan Juni 2026 akibat kenaikan harga bensin yang berdampak terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya logistik sehingga mempengaruhi harga komoditas di tingkat konsumen.

Dari sisi pasokan, karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih bergantung pada pasokan beberapa komoditas dari luar daerah menyebabkan stabilitas harga sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi daerah pemasok, distribusi antarwilayah, dan faktor cuaca.

Gangguan terhadap salah satu komponen tersebut berpotensi menyebabkan fluktuasi harga yang cukup tinggi.

Risiko inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 diperkirakan masih dipengaruhi oleh:

- fluktuasi produksi komoditas hortikultura akibat faktor musim;
- perubahan harga energi dan biaya transportasi;
- ketergantungan pasokan beberapa komoditas strategis dari luar daerah;
- potensi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca;
- meningkatnya permintaan masyarakat pada periode tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan koordinasi TPID serta pelaksanaan intervensi berdasarkan prinsip 4K secara berkesinambungan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI

Selama Triwulan II Tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan berbagai langkah pengendalian inflasi yang mengacu pada strategi nasional pengendalian inflasi melalui empat pilar utama (**4K**), yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

1. Keterjangkauan Harga

Pelaksanaan kebijakan diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat melalui pemantauan harga secara rutin, pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah pada saat diperlukan, pengawasan harga dan stok barang kebutuhan pokok serta koordinasi dengan pelaku usaha dan distributor guna menjaga harga tetap terkendali.

Dinas Perdagangan melaksanakan kegiatan berupa Pasar Murah pada saat menjelang Idul Adha di lima Desa, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan, melaksanakan monitoring/sidak pasar bersama Forkopimda dalam rangka menghadapi Idul Adha, serta melakukan survey harga 2 kali seminggu oleh Petugas dari Dinas Perdagangan.

2. Ketersediaan Pasokan

Upaya difokuskan pada pemantauan kondisi stok pangan strategis, koordinasi dengan instansi teknis, Bulog dan pelaku usaha, pemanfaatan data neraca pangan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mendorong peningkatan produksi komoditas strategis melalui dukungan kepada sektor pertanian.

Pengeluaran dan penyaluran Minyakita dari gudang BULOG ke pasar merupakan mekanisme stabilisasi pasokan agar stok barang strategis seperti minyak goreng harga terjangkau tetap tersedia dan tercukupi di pasaran.

3. Kelancaran Distribusi

TPID melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi komoditas strategis berjalan lancar melalui pemantauan jalur distribusi, identifikasi hambatan logistik, koordinasi dengan distributor dan penguatan kerja sama antar daerah dalam rangka menjamin kesinambungan pasokan.

Dinas Pertanian melaksanakan Kegiatan berupa penguatan prasarana pertanian melalui pembangunan jalan usaha tani dan perkebunan,

4. Komunikasi Efektif

TPID HST telah melaksanakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wabup sebanyak 2 kali pada TW II dan melaksanakan rapat teknis setiap bidang sebanyak 3 kali dengan dipimpin oleh Sekretaris Daerah, High Level Meeting dan Capacity Building pada TW II 1 kali dengan dipimpin oleh Bupati, dengan arahan oleh Bupati yaitu 1. Percepatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), 2. Penguatan Program Unggulan Pengendalian Inflasi “GEMPIDA”, 3. Percepatan Pembentukan BUMD Perumda Agro, Pangan dan Energi HST, 4. Optimalisasi 9 langkah konkrit Pengendalian Inflasi dan Penguatan Kinerja TPID Berbasis 4 K, serta penyampaian informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rekomendasi tindak lanjut.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

EVALUASI KEBIJAKAN

Selama Triwulan II Tahun 2026, berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilaksanakan menunjukkan bahwa koordinasi antarperangkat daerah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan menjaga fluktuasi inflasi bulanan tetap rendah, termasuk terjadinya deflasi pada bulan Mei 2026 sebagai indikasi membaiknya keseimbangan pasokan beberapa komoditas pangan. Namun demikian, inflasi kembali terjadi pada bulan Juni yang dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi dan beberapa komoditas pangan strategis.

Secara umum, pelaksanaan intervensi berdasarkan prinsip 4K telah mendukung upaya stabilisasi harga, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi cuaca, dinamika pasokan antarwilayah, serta perubahan harga energi.

Capaian

- Terlaksananya koordinasi TPID secara berkesinambungan.
- Terlaksananya intervensi pengendalian inflasi sesuai prinsip 4K.
- Tersedianya data perkembangan harga sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- Terjaganya koordinasi dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan.

Kendala

- Ketergantungan pasokan komoditas tertentu dari luar daerah.
- Fluktuasi produksi komoditas hortikultura.
- Pengaruh kenaikan biaya transportasi terhadap harga komoditas.
- Volatilitas harga pangan strategis yang masih relatif tinggi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis perkembangan inflasi, identifikasi permasalahan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi pengendalian inflasi selama Triwulan II Tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah, instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan dengan tetap mengacu pada strategi nasional pengendalian inflasi melalui pendekatan **4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)**.

Pada **aspek Keterjangkauan Harga**, TPID perlu meningkatkan intensitas pemantauan perkembangan harga komoditas strategis secara berkala melalui optimalisasi sistem pelaporan harga harian dan pelaksanaan rapat koordinasi apabila terindikasi terjadi gejolak harga. Intervensi berupa Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta pengawasan terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok perlu dilaksanakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan berbasis hasil pemantauan lapangan, terutama terhadap komoditas pangan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada aspek **Ketersediaan Pasokan**, diperlukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis, Perum Bulog, kelompok tani, pelaku usaha, dan pemerintah daerah pemasok guna memastikan kecukupan pasokan komoditas strategis sepanjang tahun. Selain itu, pemanfaatan data neraca pangan, kalender tanam, prakiraan musim, dan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) perlu dioptimalkan sebagai dasar dalam menyusun langkah antisipatif terhadap potensi gangguan produksi maupun kekurangan pasokan.

Pada **aspek Kelancaran Distribusi**, TPID perlu terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka menjamin kelancaran arus distribusi komoditas pangan strategis, terutama pada periode meningkatnya permintaan masyarakat maupun pada saat terjadi gangguan transportasi akibat kondisi cuaca. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) juga perlu terus diperluas sebagai salah satu strategi menjaga kontinuitas pasokan dan mengurangi risiko gejolak harga akibat ketergantungan terhadap daerah pemasok tertentu.

Pada aspek **Komunikasi Efektif**, TPID perlu meningkatkan kualitas koordinasi melalui pelaksanaan rapat koordinasi rutin, *High Level Meeting* (HLM), serta penyampaian informasi perkembangan inflasi kepada masyarakat secara transparan dan tepat waktu. Komunikasi publik yang efektif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi inflasi, mendorong perilaku konsumsi yang bijaksana, serta membangun optimisme terhadap langkah-langkah pengendalian inflasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pengendalian inflasi, seluruh perangkat daerah anggota TPID diharapkan dapat memperkuat kualitas pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi setiap pelaksanaan intervensi pengendalian inflasi. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan beserta kelengkapan *evidence* secara tepat waktu akan mendukung proses evaluasi kinerja TPID, mempermudah penginputan pada aplikasi tpin.id, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pengendalian inflasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, TPID Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan terus melaksanakan

pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan inflasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah strategis pada Triwulan III Tahun 2026 sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat lebih responsif terhadap dinamika harga, kondisi pasokan, serta perkembangan perekonomian daerah.

Dengan sinergi, koordinasi, dan komitmen seluruh anggota TPID serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dapat terus terjaga, risiko inflasi dapat dikendalikan, dan ketahanan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin kuat serta mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.